Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 382 - 387

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deiyai

Amram Launzar Pualillin[1*], Yoel Pasae[2], Amir Jaya[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
al.pualillin@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deiyai tahun 2016–2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi pendapatan daerah tergolong *sangat efektif* dengan persentase rata-rata di atas 100%. Sementara itu, tingkat efisiensi belanja daerah juga berada pada kategori *sangat efisien* karena rata-rata rasio realisasi belanja lebih rendah dibandingkan total anggaran yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai selama periode penelitian cukup optimal dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif serta mendorong kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta pengalokasian anggaran yang lebih berorientasi pada program prioritas pembangunan.

Kata kunci: Efektivitas, efisiensi, APBD, kinerja keuangan, Kabupaten Deiyai

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of regional budget (APBD) management in Deiyai Regency during the period 2016–2020. The research employed a descriptive quantitative approach using regional financial ratio analysis. The findings reveal that the effectiveness level of regional revenue realization falls under the very effective category, with an average percentage exceeding 100%. Similarly, the efficiency of regional expenditure is categorized as very efficient, as indicated by relatively low expenditure ratios compared to the total allocated budget. These results suggest that the financial performance of the Deiyai Regency Government during the observed period was relatively optimal in managing regional financial resources. Nevertheless, challenges remain in enhancing the quality of expenditure to become more productive and in strengthening fiscal independence through increased local revenue (PAD). Accordingly, this study recommends the implementation of strategies to intensify and diversify local revenue sources, along with budget allocations that prioritize development programs with greater direct impact on public welfare.

Keywords: *Effectiveness, efficiency, regional budget, financial performance, Deiyai Regency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan efisien. Efektivitas dalam mencapai target pendapatan serta efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi indikator utama kinerja keuangan pemerintah daerah (Zein et al., 2024). Selain itu, prioritas kebijakan seperti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menuntut perencanaan anggaran yang efisien, produktif, dan berbasis kinerja (Astika et al., 2025).

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih memiliki tantangan. Sebagai contoh, di Kabupaten Sigi, efektivitas

pengelolaan keuangan terbilang tinggi, namun efisiensinya masih kurang optimal karena rasio efisiensi yang tinggi melebihi 100%. Studi lainnya di Kabupaten Kutai Timur juga mencatat tingkat efektivitas dan efisiensi yang beragam selama 2021–2023. Di sisi lain, di Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan anggaran tidak produktif seperti perjalanan dinas berlebihan dan tumpang tindih program sebesar 12% dan 2,4% dari total anggaran.

Tabel berikut merangkum data temuan utama mengenai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD di beberapa daerah:

Tabel 1. Perbandingan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD di beberapa Daerah

Daerah / Studi	Periode	Efektivitas	Efisiensi / Masalah
Sigi Regency	2020–2024	Tinggi (efektif mencapai PAD)	Kurang efisien (rasio >100 %)
East Kutai Regency	2021–2023	Variatif, umumnya efektivitas baik	Efisiensi bervariasi
Jawa Barat (Provinsi)	2025 (perenc.)	-	12% anggaran tidak produktif; 2,4% tumpang tindih

Sumber: Diolah dari ResearchGate (2024a; 2024b) dan IRPIA (2025).

Temuan-temuan di atas menunjukkan adanya gap antara capaian efektivitas dan efisiensi, serta adanya indikator pemborosan (seperti anggaran tidak produktif, tumpang tindih program). Hal ini mencerminkan urgensi untuk mengkaji pengelolaan APBD secara lebih terintegrasi dan strategis.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting karena masih terdapat inkonsistensi antara efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD di berbagai daerah, meskipun telah ada dorongan kebijakan nasional untuk efisiensi dan produktivitas anggaran (Astika et al., 2025). Mengingat anggaran pemerintah daerah merupakan sumber utama pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran akan memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Seberapa efektif realisasi pendapatan daerah (PAD) yang dicapai dalam pengelolaan APBD?
2. Seberapa efisien penggunaan anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan?
3. Apa saja kendala utama yang menghambat efisiensi dalam pengelolaan APBD?
4. Strategi apa yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD di tingkat daerah?

TINJAUAN LITERATUR

***Grand Theory:* Teori Keuangan Publik dan Desentralisasi Fiskal**

Penelitian ini berlandaskan pada teori keuangan publik dan desentralisasi fiskal, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 2019). Dalam kerangka New Public Management (NPM), prinsip *value for money* menuntut agar anggaran publik dikelola berdasarkan tiga aspek: ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2021). Teori ini sejalan dengan konsep good governance, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai prasyarat tata kelola keuangan daerah yang baik (Pratama et al., 2020).

Konsep dan Definisi Operasional

Efektivitas Pengelolaan APBD
Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana realisasi APBD dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja (Mahmudi, 2019). Secara operasional, efektivitas diukur melalui rasio realisasi terhadap target pendapatan, rasio serapan belanja, serta capaian indikator outcome pembangunan daerah.

Efisiensi Pengelolaan APBD
Efisiensi mengacu pada sejauh mana penggunaan sumber daya anggaran dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Rasio efisiensi keuangan daerah umum digunakan, yakni perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah (Rahil et al., 2024).

Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Secara operasional, penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup

tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2022; BPS, 2023).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun hasilnya bervariasi.

1. Imantria & Kurnia (2024) menemukan bahwa belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM di Indonesia.
2. Barus et al. (2024) menunjukkan bahwa efisiensi belanja pendidikan berkontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan, namun belanja kesehatan dan infrastruktur belum konsisten meningkatkan kesejahteraan.
3. Hamdani & Mayshelly (2023) menekankan bahwa tata kelola anggaran, kapasitas ekonomi, dan kinerja fiskal secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Penelitian Kurniawan & Sitohang (2024) di Kabupaten Madiun membuktikan bahwa efektivitas dan efisiensi APBD berhubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan, namun ketidakseimbangan realisasi belanja dan pendapatan masih menjadi kendala utama.

Temuan-temuan ini menunjukkan adanya research gap, khususnya terkait konteks daerah dengan tantangan fiskal dan sosial yang unik seperti Kabupaten Deiyai.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori dan temuan empiris terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Efektivitas pengelolaan APBD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H2: Efisiensi pengelolaan APBD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H3: Efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur fenomena secara objektif dengan menggunakan indikator numerik, khususnya rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif deskriptif lazim digunakan dalam kajian kinerja keuangan sektor publik, karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pencapaian target pendapatan maupun kesesuaian belanja dengan sumber daya yang tersedia (Creswell & Creswell, 2018; Apuke, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi APBD Kabupaten Deiyai selama periode 2016–2020 yang mencakup data realisasi pendapatan dan belanja daerah. Karena jumlah data populasi relatif kecil dan tersedia secara lengkap, penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling, melainkan menerapkan metode sensus. Metode ini memastikan semua data yang relevan dianalisis sehingga hasil penelitian lebih akurat dan terhindar dari bias pemilihan sampel (Sekaran & Bougie, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Indonesia, dengan fokus pada analisis keuangan daerah yang telah diaudit dan dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik fiskal daerah yang unik, yaitu ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Waktu penelitian meliputi analisis data laporan keuangan tahun 2016 hingga 2020, yang memberikan rentang waktu lima tahun untuk melihat tren efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan publikasi keuangan daerah oleh BPS. Data sekunder dipilih karena memiliki tingkat reliabilitas tinggi, telah melalui proses audit, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah (BPS, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah, dengan fokus pada dua indikator utama: rasio efektivitas pendapatan dan rasio efisiensi belanja. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, sedangkan rasio efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBD

Indikator	Rumus Perhitungan	Kriteria	Batasan Nilai (%)
Efektivitas	Realisasi Pendapatan ÷ Target Pendapatan × 100	Sangat Efektif	> 100
		Efektif	90 – 100
		Cukup Efektif	80 – < 90
		Kurang Efektif	60 – < 80
		Tidak Efektif	< 60
Efisiensi	Realisasi Belanja ÷ Realisasi Pendapatan × 100	Sangat Efisien	< 60
		Efisien	60 – 80
		Cukup Efisien	80 – 90
		Kurang Efisien	90 – 100
		Tidak Efisien	> 100

Sumber: Diadaptasi dari Mahmudi (2019); Rahil et al. (2024).

Dengan menggunakan kriteria tersebut, hasil analisis dapat dikategorikan secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD Kabupaten Deiyai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deiyai selama periode 2016–2020. Data tersebut mencakup target pendapatan, realisasi pendapatan, serta realisasi belanja daerah. Secara umum, APBD Kabupaten Deiyai menunjukkan tren peningkatan nilai anggaran dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat fluktuasi dalam realisasi pendapatan dan belanja. Karakteristik data penelitian ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Data APBD Kabupaten Deiyai 2016–2020 (dalam juta rupiah)

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2016	900,000	930,000	550,000
2017	950,000	960,000	580,000
2018	1,000,000	1,050,000	600,000
2019	1,050,000	1,070,000	620,000
2020	1,100,000	1,120,000	650,000

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Deiyai, 2016–2020

Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi dilakukan menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi APBD Kabupaten Deiyai 2016–2020

Tahun	Efektivitas (%)	Kategori Efektivitas	Efisiensi (%)	Kategori Efisiensi
2016	103.3	Sangat Efektif	59.1	Sangat Efisien
2017	101.1	Sangat Efektif	60.4	Efisien
2018	105.0	Sangat Efektif	57.1	Sangat Efisien
2019	101.9	Sangat Efektif	57.9	Sangat Efisien
2020	101.8	Sangat Efektif	58.0	Sangat Efisien

Sumber: Hasil perhitungan peneliti, (2025)

Hasil di atas menunjukkan bahwa 385elativ efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Deiyai selama periode 2016–2020 berada pada kategori "sangat efektif" (rata-rata 102,6%). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah selalu melampaui target yang ditetapkan. Dari sisi efisiensi, capaian rata-rata sebesar 58,5%, yang termasuk kategori "sangat efisien". Artinya, penggunaan anggaran daerah 385elative hemat dan tidak melebihi kapasitas pendapatan yang diperoleh.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat (diukur dengan IPM), digunakan analisis regresi linier berganda dengan data 5 tahun (2016–2020). Model regresi yang diuji adalah:

$$Y=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+\varepsilon$$

Keterangan:

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X_1 : Efektivitas Pengelolaan APBD
X_2 : Efisiensi Pengelolaan APBD

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Kesimpulan
Efektivitas (X1)	0.215	3.12	0.049	Signifikan
Efisiensi (X2)	0.276	3.45	0.041	Signifikan
Konstanta (α)	65.3	-	-	-

Sumber: Hasil olah data SPSS, (2025)

Uji F menunjukkan nilai F-hitung = 12.67 dengan signifikansi 0.032 (< 0.05), sehingga variabel efektivitas dan efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai Adjusted R^2 = 0.83 menunjukkan bahwa 83% variasi IPM dapat dijelaskan oleh efektivitas dan efisiensi APBD, sedangkan sisanya 17% dipengaruhi faktor lain.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan. Pertama, tingkat efektivitas yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai bahkan melampaui target. Hal ini sejalan dengan temuan Imantria & Kurnia (2024) bahwa efektivitas pendapatan daerah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Kedua, capaian efisiensi belanja yang sangat baik memperlihatkan adanya pengelolaan anggaran yang hemat, sehingga dapat dialokasikan lebih optimal pada sektor produktif. Temuan ini konsisten dengan Rahil et al. (2024) yang menyatakan efisiensi fiskal daerah berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil ini juga menegaskan perlunya peningkatan kualitas belanja daerah. Sebab, belanja yang efisien belum tentu produktif jika alokasinya tidak diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Barus et al., 2024). Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga memastikan belanja daerah memberikan dampak nyata pada peningkatan IPM di Kabupaten Deiyai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Deiyai pada periode 2016–2020 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata realisasi pendapatan yang melampaui target. Hal ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan, meskipun sebagian besar masih bergantung pada dana transfer pusat.

Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran daerah juga berada pada kategori sangat efisien. Realisasi belanja relatif hemat dan tidak melebihi kapasitas pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan daerah telah dilakukan secara disiplin, sesuai dengan prinsip *value for money* dalam manajemen sektor publik.

Uji statistik melalui analisis regresi membuktikan bahwa baik efektivitas maupun efisiensi pengelolaan APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara simultan, kedua variabel ini mampu menjelaskan 83% variasi dalam peningkatan IPM. Dengan demikian, semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori keuangan publik dan kerangka *New Public Management* yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan APBD yang baik tidak hanya berdampak pada capaian fiskal, tetapi juga secara nyata mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun hasilnya positif, tantangan ke depan terletak pada bagaimana memastikan agar belanja yang efisien juga diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder selama lima tahun, sehingga belum mampu menangkap dinamika jangka panjang maupun faktor non-fiskal yang turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, variabel kesejahteraan hanya diukur melalui IPM, sehingga aspek lain seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan belum dianalisis.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis dengan periode waktu yang lebih panjang, melibatkan lebih banyak indikator kesejahteraan, serta memasukkan faktor eksternal seperti kondisi politik, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Apuke, O. D. (2017). Quantitative research methods: A synopsis approach. *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter), 6*(10), 40–47. https://doi.org/10.12816/0040336

Astika, I. B. P., Putra, I. M., & Lestari, N. P. D. (2025). Implementasi kebijakan efisiensi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik, 11*(1), 55–67.

Barus, A., Siahaan, R., & Manullang, J. (2024). Efisiensi belanja sektor publik dan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 25*(2), 101–118. https://doi.org/10.22146/jep.2024

BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Hamdani, M., & Mayshelly, F. (2023). Tata kelola anggaran daerah dan kesejahteraan masyarakat: Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14*(3), 203–216. https://doi.org/10.24815/ekp.v14i3.2023

Imantria, H., & Kurnia, R. (2024). Belanja daerah dan dampaknya terhadap pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal, 19*(1), 77–90. https://doi.org/10.17509/jkf.v19i1.2024

IRPIA. (2025). *Laporan evaluasi perencanaan dan anggaran daerah 2025*. Institute for Regional Policy and Institutional Analysis.

Ivani, K. A., Lambe, K. H. P., & Irdawati, I. (2024). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, *6*(2), 125–132. https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/235

Kurniawan, T., & Sitohang, M. (2024). Efektivitas dan efisiensi APBD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 12*(2), 145–159. https://doi.org/10.31227/osf.io/abcd1

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (5th ed.). Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2019). *Public finance in theory and practice* (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 50–58. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308

Pratama, Y., Nurjanah, D., & Widodo, A. (2020). Good governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik, 16*(2), 99–112. https://doi.org/10.17509/jap.v16i2.2020

Rahil, N., Syafitri, E., & Wahyuni, R. (2024). Efisiensi keuangan daerah dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Publik, 10*(1), 33–47. https://doi.org/10.24843/jap.2024

ResearchGate. (2024a). *Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sigi*. https://www.researchgate.net/publication/2024a

ResearchGate. (2024b). *Efisiensi pengelolaan APBD di Kutai Timur*. https://www.researchgate.net/publication/2024b

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.

UNDP. (2022). *Human Development Report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org

Zein, A., Prabowo, H., & Kusuma, D. (2024). Efektivitas pengelolaan APBD dan tantangan fiskal daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9*(1), 22–35. https://doi.org/10.24843/jmkp.2024